

Bab IV

Lemahnya Kekuatan Sipil

Dalam bab ini akan menjelaskan mengenai kekuasaan militer dalam politik Thailand . Militer dengan mudahnya dapat mempunyai kekuasaan didalamnya dikarenakan terdapat beberapa faktor pendukung antara lain negara Thailand sering terjadi konflik . Konflik tersebut berupa kudeta yang disebabkan karena beberapa hal dan Thailand sendiri sering sekali terjadi korupsi . maka dari itu militer dengan mudah menguasai politik di negara dikarenakan lemahnya kekuatan sipil . Masyarakat juga percaya akan adanya militer .

A. Peran Militer

Militer merupakan suatu kekuatan konstan yang berjalan berada dibelakang pemerintahan. Militer dengan Raja telah mewujudkan sebuah identitas nasional negara Thailand yang berupaya untuk menjadi demokratis modern . Berdasarkan peristiwa yang terjadi sekitar enam puluh tahun terakhir militer secara mayoritas mengambil sebuah peran seperti ayah . Peran ayah disini merupakan seolah-olah menyelamatkan atau melindungi negara Thailand dari tindakan korupsi , pembubaran internal ,atapun ancaman anti monarki. Sementara militer adalah elemen pemerintah yang kritis supaya demokrasi tidak ada tantangan . Militer juga harus mempunyai kesetiaan kepada elemen pendiri negara demokratis dan kontitusi . Saat militer negara tertanam sangat kuat didalam otoritas serta legitimas maka gagasan pemerintah harus menggantikan yang lain dan

dibeli oleh pimpinan militer senior⁸³. Hubungan militer dengan sipil dapat dicirikan oleh kebangkitan dalam mempengaruhi politik di Thailand sejak adanya kudeta. Dewan Penasihat kerajaan, pengadilan serta militer telah menimpa pembangunan demokratis dan sangat bersikeras dalam mempengaruhi proses perpolitikan di negara ini. Pengaruh militer dalam politik dapat ditunjukkan dengan adanya penggulingan perdana menteri atas perintah dari pengadilan. Hal tersebut menunjukkan bahwa adanya turbulensi dalam diri politik Thailand dan bersifat periodik yaitu berumur pendek. Kerapuhan akan lembaga perwakilan memungkinkan militer untuk mengendalikan kekuasaan negara melalui kontrol yang sangat efektif dan mereka pun telah mendominasinya sebuah keputusan politik⁸⁴. Hubungan militer dengan sipil dianggap sebagai kontinum didalman pengambilan keputusan melalui kontrol dari sisi yang berlawanan. Hal itu berupaya untuk memperkuat kontrol sipil, meningkatkan transparansi, mengurangi tindak korupsi, meningkatkan sektor pengadilan dan sebagainya.

Sejak terjadinya penggulingan sistem monarki absolut ke monarki konstitusi militer telah menjadi aktor didalam politik sebagai sebuah kebijakan. Militer Thailand telah memainkan peran penting dalam keamanan eksternal negara serta keterlibatan politik domestik yang menyebabkan

⁸³ . Hearn, Colonel Stephen W. 2008. The 2006 coup in Thailand lessons for emergng democracies. United State Army Reserve. Amerika.

⁸⁴ . Lindman, Lipikar Narayaem. 2017. Military Coups in Thailand: The Strategic Arguments to Justify a Democratic Setback. Department of Government uppsala university.

keterbatasan guna membela negara . Para kaum elit politik Thailand menempa jalur dimana mereka sering gunakan untuk mengambil manfaat keamanan dari mitra kekuatan utama. Budaya organisasinya dari faksionalisme , dominasi tentara serta royalisme sering mendorong untuk melakukan kudeta serta intervensi⁸⁵. Ketika terjadi perubahan rezim dimana memungkinkan militer mendominasi negara Thailand . Pada tahun 1957 menyusul kudeta lain dan aliansi baru antara satu faksi militer serta monarki mengambil alih Thailand . Penindasan militer di tahun 1992 mencemar citra angkatan bersenjata dan memungkinkan terjadinya demokrasi lagi . Hal ini mengarah pada pemilihan Perdana Menteri Thaksin Shinawatra di tahun 2001 tetapi beberapa elit dan pejabat militer senior khawatir akan menjadi suatu ancaman bagi aristokrasi . Di tengah aksi protes terhadap Perdana Menteri Thaksin pada tahun 2006 militer yang di pimpin oleh para pejabat tinggi anti Thaksin melakukan kudeta . Di bawah Dewan Nasional untuk Perdamaian dan Ketertiban (NCPO) yang mana Administrasi militer mengantur negara Thailand . Pemimpin dari junta militer yaitu Prayuth Chan – ocha secara bersamaan menjabat sebagai perdana menteri. Mengenai aturan junta bahwa telah di abdikan didalam undang-undang. NCPO telah menghilangkan hak – hak politik serta kebebasan sipil sebelumnya yang berada di sistem demokrasi sebelum terjadi kudeta militer di tahun 2014. Pada awal Mei 2014 Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa Yingluck telah melakukan

⁸⁵ . Greg Raymond . “ How Thailand’s junta threatens its external security” diakses dari www.eastasiaforum.org Pada 28 Agustus 2018 pukul 10.00.

penyalahgunaan atas kantornya dengan cara memindahkan pegawai negeri sipil ke pekerjaan lain di tahun 2011 lalu di paksa untuk mengundurkan diri . Salah satu alasan dilakukannya kudeta 2014 adalah untuk menghentikan korupsi oleh pemerintahan Yingluck Shinawatra . Namun menurut para pengamat setuju akan upaya antikorupsi sangat bias akan kubu politik mantan PM Thaksin Shinawatra serta keluarganya . Banyak perwira militer dari Majelis Legislatif Nasional yang di tunjuk oleh junta tetapi tidak ada pengadilan untuk menyelidiki kasus korupsi tersebut .

NCPO memulai suatu proses guna mengembalikan negara Thailand ke demokrasi yaitu dimana Majelis Legislatif Nasional (NLA) yang didominasi oleh militer serta National Reform Steering Assembly (NRSA) untuk memilih Komite Penyusunan Konstitusi (CDC). Konstitusi baru yang telah di sahkan pada Agustus 2016 namun karakternya bersifat konservatif . Dalam konstitusi baru tersebut militer secara tidak langsung mengendalikan senat yang ditunjuk , adanya sistem pemilihan untuk mencegah partai politik dari perolehan mayoritas kursi dan kesempatan bagi individu tidak terpilih bisa menjadi calon perdana menteri . Setelah sebelumnya mengemukakan kebijakan populis yang di populerkan oleh Perdana Menteri Yingluck Shinawatra sebagai bentuk dan mengakibatkan adanya korupsi ⁸⁶ . Pada Mei 2014 Prayuth Chan-ocha mengambil alih guna menghindari konflik sipil dan untuk

⁸⁶ . “ Thailand Country Report” diakses dari <https://www.bti-project.org> pada 28 Agustus 2018 pukul 23.00 .

menyingkirkan negara ini dari korupsi . Janji untuk membersihkan tidak sepenuhnya baru tetapi telah digunakan oleh pemerintahan secara berturut-turut dan disambut baik karena ingin permasalahan ini segera terselesaikan . Ketika para junta militer sedang berkuasa semua masyarakat Thailand menaruh harapan kepada mereka untuk memenuhi janjinya . Salah satu tindakan pertama dilakukan oleh junta adalah memastikan bahwa para petani yang ditinggalkan di luar skema penanaman padi . Langkah tersebut dilakukan untuk menenangkan para petani pedesaan ⁸⁷ .

Di bawah pemerintahan militer, peradilan dan badan – badan independen atau semi hukum lainnya termasuk Komisi Antikorupsi Nasional , Kantor Auditor Umum dan Komisi Hak Asasi Manusia Nasional diberi lebih banyak kekuasaan dan Komisi Pemeriksaan Aset baru (AEC) telah dibuat . Proses pengangkatan kepala organisasi ini diubah untuk memberikan kendali yang lebih sedikit kepada eksekutif. Hampir setiap kasus yang dibawa ke hadapan badan tersebut yang melibatkan Thaksin atau partai politik. Setelah pemberlakuan undang-undang pada tahun 2007 serta penguatan berbagai pengadilan dan lembaga pengawasan terhadap perilaku pejabat politik sangat ketat . Terbukti pada tahun 2008 Mantan Perdana Menteri dan istrinya secara terpisah diberikan hukuman dikarenakan adanya tuduhan terkait korupsi . Diwaktu yang bersamaan Perdana Menteri

⁸⁷ . “ Thailand’s Military and their limited war on corruption” diakses dari www.chiangraitimes.com pada 29 Agustus 2018 pukul 09.00 .

Samak Sundaravej terpaksa untuk mengundurkan diri dikarenakan dia telah mengambil sejumlah uang guna tampil di acara Tv . Pada tahun 2009 seorang anggota parlemen yang berasal dari Partai Demokrat dihukum dikarenakan adanya penyimpangan namun dua kali ditemukan tidak bersalah di tahun 2010 dan terus bertahan . Pada akhir 2010 peradilan terus mengejar para politisi dari Partai Demokrat serta pihak terkait tuduhan adanya pelanggaran⁸⁸.

Di Thailand komisi Anti Korupsi Nasional (NACC) di bentuk pada tahun 1999 saat itu sedang mengalami tekanan dalam situasi politik yang cukup tegang dikarenakan penyelidikan korupsi di pasar besar . Adanya dugaan bahwa National Rice Pledge Scheme yang di pimpin oleh Perdana Menteri terlibat dalam kasus penipuan pajak sebesar 15 miliar dolar kurang lebih selama dua tahun terakhir . NACC dituntut untuk melindungi para staff dari serangan granat serta mengeluarkan sebuah pernyataan yang mana menjelaskan mengenai tindakan sebagai entitas netral. Didalam deklrasi Bangkok pun menyimpulkan bahwa pekerjaan lembaga anti korupsi perlu dijadikan prioritas nasional dan mereka harus dilestarikan baik dalam konstitusi atau undang-undang⁸⁹ . NACC mempunyai

⁸⁸ . “Thailand Country Report” diakses dari <https://www.bti-project.org> pada 29 Agustus 2018 pukul 21.00.

⁸⁹ . “Fighting corruption: the role of the Anti-Corruption Commission” diakses dari <https://www.transparency.org> pada 17 Agustus 2018 pukul 20.00.

kekuasaan investigasi yang sangat luas tetapi sebenarnya tidak ada hak wewenang untuk mengadili kejahatan dan merujuk kasus tersebut kepada jaksa penuntut umum . Diwaktu secara bersamaan NACC dapat mengirim laporan ke pihak senat guna menentukan apakah dapat melakukan tindakan kriminal kepada pejabat yang melanggar. Mereka juga bekerja sama dengan lembaga pemerintah asing untuk permasalahan korupsi. Apabila Undang-undang penyucian di lakukan maka NACC kemungkinan akan memainkan suatu peran penting didalam penegakan hukum anti korupsi⁹⁰ .

Vicha Mahakun mengatakan bahwa NACC telah menemukan penyimpangan yang berasal dari kebijakan Perdana Menteri Yingluck berupa kebijakan skema beras dan memberi peringatan kepada pemerintahannya secara tertulis sebanyak dua kali . Peringatan yang di berikan oleh NACC bertujuan untuk menghentikan kebijakan tersebut dan Kantor Auditor Jenderal telah mengirim sebanyak empat kali serupa ke pemerintahan Yingluck . Namun pihak pemerintah mengabaikan peringatan itu dengan alasan bahwasannya merupakan janji ketika kampanye pemilihan umum di tahun 2011 dan sebelum NACC menerima keluhan untuk menyelidiki Perdana Menteri atas dugaan korupsinya . Keluhan itu muncul ketika setelah Menteri Perdagangan Boongsong Teriyapirom serta pejabat

⁹⁰ . Michael Ramirez . “ Thailand : Anti – Corruption Compliance” diakses dari <https://globalinvestigationsreview.com> pada 20 Agustus 2018 puku 23.00 .

pemerintahan lainnya yang di tuduh melakukan penyimpangan terkait kesepakatan pemerintah ke pemerintah guna menjual cadangan beras dari negara China ⁹¹. Komisi anti korupsi resmi menyatakan sedang melakukan penyelidikan terhadap Perdana Menteri Yingluck Shinawatra atas kasus mengenai skema subsidi beras oleh pemerintah. Komisi anti korupsi telah menugaskan satu menteri untuk menyelidiki orang lain di balik kasus itu . Komisi Anti Korupsi Nasional (NACC) mengatakan bahwa mereka hanya ingin mencari dimana peran Yingluck dalam skema tersebut . Perdana Menteri Yingluck Shinawatra merupakan ketua komite Nasional Padi ⁹². Tujuan dari skema ini adalah untuk membeli beras dari petani dengan harga sekitar 50 persen diatas harga pasar global lalu menimbun beras guna menaikkannya . Menurut penyelidikan yang dilakukan oleh NACC dampak adanya skema subsidi tersebut menyebabkan kerugian lebih dari USD 16 miliar selain itu di perkirakan 16 juta ton beras mati dan hampir 3 juta ton hilang⁹³.

⁹¹ . “ How the NACC overcame obstacles in rice-pledging case scam” diakses dari <http://www.nationmultimedia.com> pada 21 Agustus 2018 pukul 19.00.

⁹² . “ Thai PM Yingluck probed over 'corrupt rice subsidy scheme” diakses dari <https://www.bbc.co.uk> pada 18 Agustus pukul 24.00.

⁹³ . Ms Nattawadee Inganannat . “Showcasing notorious- Thailand corruption cases” diakses dari <http://www.censere.com> pada 20 Agustus 2018 pukul 07.00.

Pada 19 Mei Perdana Menteri Yingluck akhirnya hadir di pengadilan para pendukungnya pun juga hadir dalam persidangan . Didalam pengadilan tersebut Yingluck mengaku tidak bersalah atas tuduhan mengenai skema penanaman beras . Selain dia dituduh melalaikan tugas yaitu untuk menghentikan korupsi yang mana mengakibatkan kerugian pembayaran pajak sebesar US \$ 15 miliar . Sidang bisa saja berlangsung selama satu tahun serta pihak pengadilan menetapkan jaminan sekitar US \$ 900.000 dan melarang Yingluck untuk meninggalkan Thailand tanpa ada persetujuan⁹⁴ . Tuduhan yang di berikan kepada Yingluck berasal dari salah satu bagian legislasi pemerintah yaitu berkewajiban membayar petani secara signifikan di atas harga pasar apapun kualitasnya . Bank koperasi Pertanian dan Pertanian Thailand tidak mampu lagi membayar sejak bulan September ⁹⁵ .

Pada awal bulan Juni 2014 pengadilan di provinsi Chaiyaphum baru saja menemukan pemilik penggilingan padi serta terdapat sembilan petani tersebut telah memalsukan dokumen resmi pengupahan beras dan mencuri kurang lebih 750 to yang berasal dari tumpukan lalu menyalurkan beras ke pabrik yang sama .

⁹⁴ . “Prime Minister Yingluck Shinawatra's Statement on the National Anti-Corruption Commission (NACC)'s charges over the Rice Pledging Scheme” diakses dari <http://www.mfa.go.th> pada 21 Agustus 2018 pukul 21.30 .

⁹⁵ . David Stout . “ Thai PM Yingluck to Face Graft Charges Over Botched Rice Scheme” di akses dari <http://time.com> pada 21 Agustus 2018 pukul 22.30 .

Akibat dari tindakan pemalsuan dokumen tersebut maka pemilik dari penggilingan padi di jatuhi hukuman kurun waktu 20 tahun penjara. Selain itu para sembilan petani juga masing-masing mendapatkan denda dan di jatuhi hukuman penjara kurang lebih enam bulan yang mana ditanggihkan selama kurun waktu dua tahun . Bulan juni 2014 pengadilan distrik Samut Prakarn telah menghukum presiden dari sebuah perusahaan perdagangan beras dengan hukuman penjara kurun waktu enam tahun di karenakan telah menggelapkan sebanyak 20.000 ton beras setara 200 juta Baht di tahun 2007 ⁹⁶. Militer kemudian merencanakan peta jalan menuju demokrasi . Dalam permasalahan negara Thailand yang mana wakil-wakil tentara akan duduk di senat dan berfungsi sebagai alat kekuasaan lama guna mengimbangi pemerintahan sipil di masa depan . Referendum sangat penting bagi kelangsungan rezim militer di bawah kepemimpinan Prayuth Chan – Ocha⁹⁷ .

⁹⁶ . “Thailand’s post-coup crackdown” diakses dari <http://www.nortonrosefulbright.com> pada 23 Agustus 2018 pukul 20.00.

⁹⁷ . Ravin Chachavalpongpun . “ Thai Military aims to institutionlize political role” diakses dari www.japantimes.co.jp pada 30 Agustus 00.05.